



Judul : 7 Fraksi Dukung Perppu Ormas: Partainya Pak Zul Di Barisan Oposisi
Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-9

7 FRAKSI DUKUNG PERPPU ORMAS

Partainya Pak Zul Di Barisan Oposisi

SESUAI prediksi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas lolos di DPR. Tujuh fraksi menyetujui Perppu ini menjadi undang-undang. Yang menarik, salah satu partai pendukung Jokowi yakni Partai Amanat Nasional (PAN) justru berada di barisan oposisi menolak Perppu Ormas.

Mayoritas fraksi di DPR menerima Perppu Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna hari ini. Tujuh fraksi yang menerima adalah: PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat. Selain Demokrat, enam partai merupakan pendukung pemerintah.

Demokrat, yang awalnya menyatakan menolak justru berbalik mene-

rima usulan pemerintah dengan catatan agar Perppu tersebut segera direvisi setelah diundangkan. Sikap menerima dengan catatan ini juga disampaikan PPP dan PKB.

Demokrat, melalui anggota fraksinya, Fandi Utomo mengatakan partainya menginginkan adanya revisi mengenai dimunculkannya kembali proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas dan pengurangan hukuman pidana yang bisa mencapai seumur hidup.

Juru Bicara Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes, memberikan catatan agar pemerintah atau Dewan menggunakan hak legislasi dalam waktu sesegera mungkin untuk undang-

◆ BERSAMBUNG KE HAL 9

PAN Tak Masalah Jika Dievaluasi Jokowi

Partainya Pak Zul

... DARI HALAMAN 1

undang ini direvisi dan dimasukkan ke prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2018

Juru Bicara Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, fraksinya setuju untuk menerima Perppu Ormas namun dengan mengurangi masa hukuman pelanggaran Perppu Ormas. Dalam Perppu Ormas, seseorang bisa dipenjara seumur hidup dan paling ringan lima tahun jika terbukti menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Barisan oposisi yakni PKS dan Gerindra konsisten dengan sikapnya menolak Perppu Ormas disahkan sebagai UU. Anggota Fraksi PKS, Sutriyono menegaskan penolakan itu diambil melalui kajian matang dan pandangan dari organisasi serta masyarakat.

"PKS menilai Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 bisa dijadikan landasan hukum. Yang diperlukan revisi (un-

dang-undang). Bukan melalui Perppu," ujar Sutriyono. Senada, Gerindra juga berpendapat tidak ada urgensi memberikan Perppu Ormas.

Nah, menjadi menarik adalah sikap PAN. Partai pimpinan Ketua MPR Zulkifli Hasan itu justru pro terhadap kelompok oposisi. Padahal, PAN merupakan salah satu partai pendukung pemerintah dengan satu menteri di pemerintahan Jokowi-JK, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai wajar perbedaan sikap partainya dalam menyikapi Perppu Ormas. Ia menambahkan dalam negara demokrasi berbeda pendapat merupakan hal yang wajar dan tak perlu dipermasalahkan.

"Pilkada DKI PAN diajak dukung Ahok kami enggak mau, waktu Undang-Undang Pemilu kami diajak ikut parpol pendukung pemerintah, berbeda. Dan ini kami beda kembali. Bagi PAN itu biasa karena kami punya dasar argumentasi mengambil keputusan jadi tak

ikut-ikutan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Yandri menambahkan partainya tak menyetujui Perppu Ormas untuk disahkan sebagai UU karena menjadikan pemerintah sebagai penafsir tunggal Pancasila dengan menghilangkan proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran.

Tidak hanya itu, Yandri juga menegaskan partainya siap dievaluasi oleh Presiden Jokowi terkait keberadaannya di koalisi. Ia menegaskan PAN tak bisa diancam oleh siapapun dalam menentukan sikap politik khususnya terkait Perppu Ormas.

"Persoalan kami di pemerintah itu persoalan lain, dan silakan Pak Jokowi dan koalisi menilai, kami serahkan saja, kami tak punya beban, tak punya kekhawatiran yang berlebihan," lanjut Yandri.

Nah, hari ini DPR akan memutuskan melalui Paripurna apakah Perppu Ormas resmi disahkan menjadi UU atau tidak. Namun, pandangan mini fraksi kemarin

sudah terpetakan bahwa Perppu Ormas segera disahkan menjadi UU.

Pengamat politik dari Universitas Parahiyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf mengaku tidak heran melihat beda sikap PAN ihwal Perppu Ormas dengan pemerintah. Menurutnya, para politisi PAN hingga Ormas Muhammadiyah konsisten menolak Perppu Ormas.

"Sebagai sebuah partai justru akan menjadi masalah jika berbeda sikap dengan elite dan akar rumputnya. Muhammadiyah itu konsisten menolak Perppu Ormas," ujar Asep kepada Rakyat Merdeka.

Mengenai sikap PAN di pemerintahan Jokowi-JK, sudah lama partai berlambang matahari itu bersikap 'nakal' dengan jalan pemerintah. Termasuk, dengan sikap pro oposisi di pemerintahan Jokowi.

"Masalahnya, jika tidak konsisten akan ditinggalkan konstituennya. Soal Perppu Ormas mulai dari Amien Rais sampai Ormas Muhammadiyah menolaknya," pungkasnya. ■ BSH